BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Regionalisme adalah salah satu komponen penting dalam studi hubungan internasional selain institusionalisasi dan globalisasi. Berakhirnya perang dingin adalah salah satu pemicu menjamurnya regionalisme di dunia. Tujuan dari regionalisme adalah untuk menciptakan kerjasama antar negara-negara yang pada akhirnya menggabungkan dan menyatukan berbagai keragaman dalam satu kesatuan yang terintegrasi dalam satu kawasan dengan kata lain berarti regionalisme berupaya menyatukan dan menggabungkan berbagai keberagaman baik itu geografi, politik, ekonomi maupun sosial budaya[1].

Berbagai proses regionalisme pun terjadi diberbagai kawasan dengan latar belakang permasalahan kawasan masing-masing. Kawasan Asia Tenggara pun memiliki latar belakang permasalahan tersendiri. Adanya dua kekuatan negara besar yang ingin terus menguasai kawasan Asia Tenggara yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet pada era pasca Perang Dingin. Maka dari itu negara Asia Tenggara menyadari perlu adanya kerjasama antar negara dikawasan Asia Tenggara untuk menekan saling curiga satu sama lain dan membangun saling percaya serta mendorong pembangunan kawasan. Sebelum terbentuk ASEAN pada tahun 1967 menjadi organisasi

---

[1] *"Konsep Integrasi Regionalisme Dalam Studi Hubungan Internasional"* diakses dari :http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3799/1/fisip-anthonius3.pdf. pada tanggal 23 Maret 2012, Pukul 12.34 WIB

UPN "VETERAN" JAKARTA

kawasan Asia Tenggara, negara-negara Asia Tenggara sudah berinisiatif untuk membangun kerjasama regional baik yang bersifat intra maupun ekstra kawasan seperti *Association of Southeast Asia* (ASA), Malaya, Philipina, Indonesia (MAPHILINDO), *South East Ministers of Education Organization* (SEAMEO), *South East Asia Treaty Organization* (SEATO) dan *Asia and Pacific Council* (ASPAC).[2]

Setelah munculnya berbagai organisasi yang sudah disebutkan diatas maka kawasan Asia Tenggara mulai menjadi kawasan yang lebih stabil dari sebelumnya dan ingin lebih menciptakan kawasan yang terintegrasi. Hal ini terlihat lebih serius lagi ketika adanya pertemuan-pertemuan antar Menteri Luar Negeri yaitu Indonesia (Adam Malik), Malaysia (Tun Abdul Razak), Thailand (Thamat Koman), Filipna (Narasco) dan Singapura (S. Rajaratnan) sehingga menghasilkan Deklarasi Bangkok maka tercetuslah ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. ASEAN adalah singkatan dari *Association of Southeast Asian Nations* yang pada awalnya memiliki tujuan ingin menciptakan kawasan Asia Tenggara yang aman dan stabil selain juga ingin membendung pengaruh komunis yang masih terasa pada saat paska Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Hadirnya ASEAN dikawasan Asia Tenggara sebagai organisasi regional memiliki prinsip-prinsip utama sebagai acuan berjalanya organisasi tersebut :

- Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integrasi wilayah

[2] Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN DEPLU RI. *ASEAN Selayang Pandang Edisi 2008*. Jakarta.2008 hal. 1.

UPN "VETERAN" JAKARTA

nasional dan identitas nasional setiap negara.

- Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas dari pada campur tangan, subversive atau pengaruh dari pihak luar.
- Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota atau non-intervensi.
- Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai.
- Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan.
- Kerjasama efektif antar anggota.[3]

prinsip-prinsip yang dimiliki oleh ASEAN sejak Deklarasi Bangkok dibentuk tetap dipegang teguh oleh seluruh anggota ASEAN pada saat itu. Tetapi dilain sisi ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara seperti tidak memiliki basis hukum yang jelas dan mengikat apabila terjadi konflik atau permasalahan kedepannya. Dengan berjalanya waktu walaupun ASEAN sangat "kendur" dalam basis hukum tetapi ASEAN mengalami proses perluasan keanggotan sejak terbentuknya ASEAN pada tahun 1967 yang pada awalnya hanya beranggotakan 5 negara anggota. Pada tanggal 7 Januari 1984 Brunei Darussalam secara resmi menjadi anggota ke-6 ASEAN dalam sidang khusus Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 29-30 Juli 1995 tepatnya pada pertemuan para Menteri Luar Negeri (AMM) ke-28 di Bandar Seri Bengawan negara Viet Nam diterima menjadi anggota ASEAN ke-7. Langkah Brunei

---

3 "*Mengenal Lambang ASEAN dan Artinnya*" diakses:http://www.anneahira.com/lambang-asean-dan-artinya.htm ,Pada tanggal 14 Febuari 2012, pukul 11.33 WIB.

UPN "VETERAN" JAKARTA

Darussalam dan Viet Nam menjadi anggota negara ASEAN juga diikuti oleh Laos dan Myanmar yang diterima sebagai anggota penuh ASEAN melalui suatu upacara resmi pada tanggal 23 Juli 1997 dalam rangkaian Pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) ke-30 di Malaysia[4]. Kehadiran ASEAN dikawasan Asia Tenggara menjadi wadah yang cukup penting bagi negara-negara dikawasan Asia Tenggara ini terlihat ketika ASEAN tidak memiliki basis hukum yang jelas tetapi ASEAN mengalami perluasan anggota yang pada tahun 1967 hanya 5 anggota, tetapi sampai tahun 1997 ASEAN sudah memiliki 9 negara anggota.

Perluasan keanggotaan yang dialami oleh ASEAN menjadi bukti bahwa ASEAN mendapatkan kepercayaan dari 9 negara anggota untuk terus memajukan kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan yang lebih dinamis baik secara politik, keamanan dan ekonomi. Menciptakan kawasan yang stabil adalah cita-cita ASEAN bagi kawasan Asia tenggara, tetapi kawasan ini tidak luput dari berbagai permasalahan. Tepat pada tahun 1997 salah satu negara anggota ASEAN yaitu Thailand mengalami krisis.[5] Krisis yang diawali oleh negara Thailand berdampak keberbagai negara sampai kawasan Asia. Karenanya, krisis ini sering disebut sebagai krisis ekonomi Asia. Negara-negara Asia yang terkena dampak dari krisis Asia sehingga mempengaruhi mata uang, bursa saham dan harga asset lainya antara lain adalah Filipina, Malaysia, Indonesia, Hongkong, Korea Selatan bahkan

---

[4]Direktorat Jendral Kerjasama ASEAN DEPLU RI. *ASEAN Selayang Pandang Edisi 2008*. Jakarta.2008 hal. 2.

[5] Krisis di Thailand disebabklan oleh jatuhnya mata uang Bath karena defisitnya perdagangan Thailand dibidang industri yang diakibatkan oleh berkembangnya perindustrian Cina dan juga jatuh temponya hutang luar negeri Thailand yang menyebabkan tingginya permintaan dolar dan terbatasnya cadangan devisa.

UPN "VETERAN" JAKARTA

Amerika Serikat pun terkena dampak dari krisis tersebut.

Krisis yang melanda Asia juga dirasakan oleh 4 negara ASEAN yaitu Thailand, Filipina, Malaysia, dan kemudian Indonesia juga tidak luput dari permasalahan tersebut. Empat negara tersebut dianggap negara-negara anggota ASEAN yang perekonomian negaranya yang paling menjanjikan dikawasan Asia Tenggara. Dengan hadirnya berbagai permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN terutama permasalahan krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 yang juga melanda perekonomian negara-negara ASEAN maka perlu adanya langkah baru yang harus dijalani oleh ASEAN. Setiap negara anggota ASEAN tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri dalam menjalankan urusan dalam negerinya terutama dalam sektor perekonomian yang pada saat itu diguncang oleh krisis ekonomi Asia 1997. Pada saat itu ASEAN yang masih "kendur" dalam suatu kelembagaan tidak dapat berbuat apa-apa dalam menyelamatkan setiap negara anggota ASEAN yang terkena dampak dari krisis ekonomi Asia pada tahun 1997. Jadi perlu adanya tindakan serius dan bersama antara negara-negara anggota ASEAN dalam menghadapai krisis eknomi pada saat itu sehingga ASEAN dapat keluar dari gerbang krisis ekonomi Asia tahun 1997 dan menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang kompetitif dan teritegrasi dengan ekonomi global.

UPN "VETERAN" JAKARTA

I.2 Rumusan Permasalahan

Perjalanan ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara menandakan kawasan Asia Tenggara memiliki potensi yang besar sebagai kawasan yang maju sehingga dapat memainkan perannya di tingkat regional maupun di tingkat internasional. Perjalanan ASEAN tidak selalu baik dan lancar yang seperti diharapakan para pemimpin ASEAN. Ini ditandai dengan kemunculan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997. Krisis Asia meguncang perekonomian negara-negara ASEAN antara lain Thailand, Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Dengan hadirnya permasalahan krisis tersebut memperlihatkan ketidakberdayaan ASEAN dalam menyelamatkan negara anggotanya dalam permasalahan krisis tersebut. Semenjak ASEAN dibentuk pada tahun 1967 sampai terjadinya krisis pada tahun 1997 rejim ekonomi ASEAN tidak dapat bekerja dengan baik yang diindikasikan lambatnya perubahan kelembagaan *(institusional progress)* ASEAN dan tidak adanya inovasi-inovasi institusional baru. Ketidakefektifisan rejim ekonomi ASEAN ini betul-betul terbukti ketika Krisis Asia muncul dan hal itu membuat negara-negara ASEAN tidak bisa bersatu. Dengan kata lain krisis ini memperlihatkan kelemahan ASEAN sebagai institusi regional. Ini juga ditandai dengan ketidakmampuan ASEAN dalam menggalang respon kolektif dalam menghadapi krisis tersebut. Karena itu kemudian pasca krisis Asia negara-negara ASEAN mendorong untuk melakukan reformasi institusional kearah institusi yang mampu memfasilitasi respon kolektif kedepanya. Maka tulisan ini mencoba untuk melihat sejauh mana ASEAN

UPN "VETERAN" JAKARTA

belajar dari kegagalan Krisis Asia yang kemudian mendorong ASEAN melakukan sejumlah perbaikan untuk menciptakan institusi regional yang lebih tanggap terhadap krisis kedepannya dan membutuhkan serangkaian reformasi kelembagaan. Dan secara spesifik penelitian ini mencoba mengangkat hal yang penting yaitu **Bagaimana upaya-upaya ASEAN dalam mereformasi rejim ekonomi ASEAN untuk meningkatkan kerjasama ekonomi ASEAN pasca krisis Asia?**

Dalam skripsi ini akan mengamati proses reformasi kelembagaan ekonomi ASEAN periode 1997 hingga 2007. Tahun 2007 dipilih sebagai pembatasan periode skripsi ini karena pada tahun 2007 hadirnya *ASEAN Charter* yang disepakatai sebagai landasan konstitusional ASEAN, selain itu juga pada tahun 2007 ASEAN sudah memiliki Cetak Biru KEA yang berfungsi sebagai *road map* untuk menciptakan *ASEAN Community* pada tahun 2015 mendatang.

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana upaya-upaya reformasi institusional dalam rejim ekonomi ASEAN untuk merespon Krisis Asia sehingga dengan adanya upaya-upaya reformasi tersebut dapat menciptakan ASEAN yang lebih terintegrasi dan lebih responsif dalam kerjasama ekonomi ASEAN.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

UPN "VETERAN" JAKARTA

1. Mengetahui bahwa krisis atau permasalahan yang terjadi dalam sebuah kawasan dapat mempengaruhi bahkan merubah sebuah rejim lama yang dianggap gagal sehingga dibutuhkan rejim yang baru melalui perubahan dalam sebuah rejim.
2. Mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan oleh ASEAN untuk merubah rejim ekonomi ASEAN dalam meresepon krisis Asia 1997 dan ingin menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang kompetitif dan terintegrasi dengan ekonomi global dimasa mendatang.
3. Secara akademis, penelitian ini diharapkan akan memberikan pengetahuan dan penjelasan secara umum dan menambah wawasan bagi para pembaca mengenai proses perubahan rejim ekonomi di ASEAN.

I.5 Tinjauan Pustaka

Persolaan Krisis Asia yang terjadi pada tahun 1997 sudah mendapat perhataian yang banyak bagi para peneliti Hubungan Internasional untuk diteliti. Bukan hanya permasalahan krisis yang coba dibahas dan diperdebatkan oleh para ilmuan, tetapi permasalahan reformasi kelembagaan di Asia khususnya di ASEAN dalam merepon krisis Asia tersebut.

Dalam buku yang berjudul *"Economic Liberalization and Integration in East Asia. A post-crisis paradigm*"[6] yang ditulis oleh Yung

[6] Yung Chul Park, *Economic Liberalizationand Intergration in East Asia: A Post-Crisis Paradigm*. (Oxford University Press: 2006), hlm.3

UPN "VETERAN" JAKARTA

Chul Park mengemukakan secara tegas terjadinya krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 menjadikan Asia Timur jatuh dalam permasalahan finansial dan melumpuhkan negara-negara di Asia Timur dalam sektor ekonomi, tetapi dilain sisi terjadinya krisis ekonomi tahun 1997 menjadikan peluang bagi negara-negara Asia Timur untuk bangkit menjadi negara maju dikawasan ini. Salah satu negara Asia Timur yaitu Cina mengambil kesempatan dalam dimensi krisis Asia ini untuk meliberalisasikan ekonominya dibelahan dunia sehinga Cina tidak lagi menjadi kekuatan ekonomi regional di Asia Timur, tetapi menjadi kekuatan ekonomi global. Krisis keuangan 1997-1998 telah menggerakan dua inisiatif yang saling terkait untuk kerjasama keuangan dan integrasi diwilayah ini yaitu dapat dilihat oleh kelompok kerjasama tiga negara Asia Timur yaitu Cina, Jepang, Korea Selatan dengan ASEAN yang dikenal dengan ASEAN +3 dan juga munculnya *Chiang Mai Initiative*. Kedua inisiatif ini diikuti oleh proliferasi bilateral perjanjian perdagangan bebas (FTA) sehingga menciptakan kawasan ini terintegrasi secara ekonomi. Skema kerjasama ASEAN+3 yaitu berkomitmen untuk membuka kedua kawasan secara bebas untuk melakukan perdagangan bebas baik barang, jasa maupun modal dari waktu ke waktu. Upaya ini akan berjalan lancar apabila melakukan kerjasama dalam pendekatan bilateral. Tetapi apabila upaya ini dijalankan dalam pendekatan multilateral dengan tujuan mendorong integrasi akan berbenturan bagi ketiga negara Asia Timur yang memiliki kepentingan masing-masing bagi ASEAN. Jadi dalam buku ini menjelaskan bahwa permasalahan krisis ekonomi tahun 1997 memberi peran adanya perubahan ekonomi kearah liberalisasi dan integrasi di

UPN "VETERAN" JAKARTA

kawasan Asia Timur. Dalam buku ini tidak membahas bagaimana krisis mendorong proses konsolidasi dalam internal ASEAN. Hal ini terbukti ASEAN melakukan serangkian kerjasama perdagangan bebas dengan kawasan lain yaitu kawasan Asia Timur dengan ditandai ASEAN +3 dibandingkan ASEAN melakukan kerjasama dalam internal ASEAN.

Tulisan berikutnya adalah karya Stephan Haggard yang berjudul *The Political Economy of the Asian Financial Crisis"*. Dalam bukuya Stephan Haggard memiliki tiga pertanyaan penelitian utama untuk diteliti. Pertama, apakah faktor-faktor politik berkontribusi terhadap kerentanan Asia terhadap krisis, dan jika demikian bagaimana? Kedua, bagaimana kewajiban pemerintah dan penerus mereka mengelola politik kontroversial penyesuaian, termasuk langkah-langkah jangka pendek krisis dan jangka panjang dalam perubahan struktural? Dan ketiga, apakah konsekuensi politik dan institusional dari krisis tahun 1997-98, termasuk untuk konsolidasi demokrasi?[7] Dengan ketiga pertanyaan utama tersebut Stephen Haggard mencoba mencari jawaban dalam bukunya bahwa krisis finansial Asia pada tahun 1997-1998 menguncang kekuatan ekonomi dinegara-negara Asia. Untuk mengurangi resiko krisis dimasa depan negara-negara Asia tidak hanya memerlukan (*discrete policy)* kebijakan diskrit dan perubahan peraturan, tetapi perlu adanya perubahan secara kelembagaan politik dan transparansi peningkatan bisnis pemerintah. Tekanan krisis ekonomi di Asia pada tahun 1997-1998 menciptakan perubahan kelembagaan politik yang

---

[7] Stephen Haggard. *The Political Economy of the Asian Financial Crisis*. (Institute for International Economics, Washington DC 2000), hlm. 1

UPN "VETERAN" JAKARTA

lebih demokratis yang terlihat dari adanya sejumlah gerakan reformasi politik pasca krisis di sejumlah negara Asia. Sehinga sistem politik demokrasi dianggap layak dalam menyelesaikan permasalahan krisis tersebut. Hal ini dapat dilihat adanya perubahan secara bertahap mengubah sisitem keuangan, tata kelola perusahaan dan bisnis-pemerintah dalam cara yang penting membuat negara-negara Asia lebih akuntabel dan transparan. Permasalahan krisis menunjukan demokrasi menjadi tangguh dan maju dikarenakan adanya reformasi ekonomi dikawasan Asia. Sehingga pemerintah juga berkomitmen untuk meliberalisasikan pasar keuangan mereka bagi kepentingan negara masing-masing. Memang krisis Asia sangat mempengaruhi instutisional politik domestik disejumlah negara Asia dan juga mempengaruhi relasi politik antar negara yang terkena krisis tersebut dengan kata lain krisis finansial Asia mendorong transformasi pelembagaan ekonomi di beberapa organisasi Asia. Hal yang diabaikan dalam tulisan ini mengenai reformasi institusional di Asia, tetapi tulisan ini hanya berbicara pengaruh krisis hanya mempengaruhi negara per negara tetapi Haggard tidak melihat dari kacamatainstitusional regional yaitu ASEAN.

Dalam artikel *"Asia's Institutional Creation and Evolution"* yang ditulis oleh Yasumasa Komori,[8] dijelaskan kawasan Asia-Pasifik dan Asia Timur mengalami perubahan secara evolusi dalam institusional kawasan. Sampai akhir tahun 1980-an kawasan Asia-Pasifik tidak memiliki institusi

[8] Yasuma Komori. 2009. *Asia's Institutional Creation and Evolution,* Vol. 33 No. 3. Hlm. 151

UPN "VETERAN" JAKARTA

regional antar pemerintah *(intergovernmental regional institutions).* Walaupun beberapa organisasi kawasan terbentuk sejak berakhirnya Perang Dingin baru hanya satu dikawasan Asia Tenggara yang memiliki organisasi kawasan yang tetap eksis dalam kancah perpolitikan internasional yaitu *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) yang dibentuk pada tahun 1967. Setelah ASEAN muncul diranah kawasan Asia, maka adanya dorongan bagi kawasan Asia-Pasifik untuk membentuk organisasi kawasan lainya seperti terbentuknya *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC) pada tahun 1989. Setelah terjadinya krisis Asia tahun 1997-1998 menandakan banyaknya pengaturan ekonomi regional dan rancangan baru yang muncul dalam rangka untuk merespon krisis Asia dan juga mengembangkan mekanisme keuangan yang baru. Pegembangan kelembagaan yang paling signifikan selama periode ini adalah munculnya forum regioanl pertama di Asia Timur, dimulai ketika pemimpin ASEAN mengundang negara sahabatnya yaitu Cina, Jepang dan Korea Selatan pada KTT ASEAN pada tahun 1997. dengan momentum pertemuan tersebut maka terciptalah kerjasama antar ASEAN dengan ketiga negara tersebut yang dikenal dengan ASEAN+3, tujuan ASEAN+3 ini untuk mempromosikan kerjasama regional dalam aspek keuangan dan ekonomi . Bukan hanya ASEAN+3 yang tercipta pasca krisis Asia 1997-1998, tetapi banyak negara Asia-Pasifik Australia, Selandia Baru dan India yang menjalin kerjasma dengan ASEAN. Sebagai hasil perkembangan tersebut, banyak negara di Asia Timur dan Asia-Pasifik sekarang memiliki *regional arragements* dengan tumpang tindih keanggotaanya. Dengan pesatnya

UPN "VETERAN" JAKARTA

pertumbuhan regional arragements pasca krisis ini dapat diduga bahwa krisis memainkan peranan penting dalam mendorong proses ini.

I.6 Kerangka Pemikiran

Rejim Internasional

Suatu rejim dapat diibaratkan sebagai suatu institusi sosial yang mengatur tindakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan bersama dalam suatu bidang masalah tertentu. Seorang pakar ilmu hubungan internaional yang mengkaji masalah rejim yaitu Oran Young berpendapat bahwa suatu rejim tidak harus identik dengan suatu organisasi yang formal, melainkan dapat juga mengacu pada keberadaan pola-pola kebiasaan yang telah diakui bersama *(recognized patterns of practice)* atau semacam struktur yang diartikulasikan secara formal maupun informal.[9]

Young menyatakan beberapa komponen dasar yang terdapat dalam sebuah rejim yaitu komponen subtantif, prosedural dan implementasi. Komponen substantif menetapkan hak-hak dan aturan rejim. Komponen prosedural merupakan pengaturan yang telah diakui bersama menyangkut cara-cara pengambilan pilihan kolektif dalam keadaan yang membutuhkan penyelesaian bersama. Sedangkan komponen implementasi mengacu pada mekanisme-mekanisme dalam rejim yang dapat membuat para anggota patuh pada keputusan-keputusan yang telah dicapai.[10]

Definis yang telah dikemukakan oleh Young tentang komponen-

---

[9] Oran R. Young, "International Regimes" Problems of Concepts Formation, World Politics, Vol. XXXII, No. 3, (April 1980), Hal 332

[10] *Ibid*., hal 333

UPN "VETERAN" JAKARTA

komponen rejim dapat memberikan kita arahan bahwa suatu rejim dapat berfungsi secara baik jika dilengkapi oleh tiga unsur penting yaitu substantif, prosedural dan implementatif. Jika diamati dengan seksama batasan Young tentang komponen-komponen rejim masih terlihat belum adanya ketegasan pembatas antar komponen. Apa yang dimaksud dengan komponen prosedural dan implementasi, misalnya cenderung tumpang tindih sehingga sulit membedakan masing-masing dalam rejim yang sesungguhnya. Untuk lebih menjelaskan definisi Young, maka disini akan dijelaskan lagi definisi yang lebih jelas dan rinci tentang komponen-komponen rejim. Definisi yang telah disepakati oleh para pemerhati rejim dalam studi hubungan internasional ini menetapkan bahwa rejim merupakan:

> *"serangkaian prinsip, norma, peraturan dan proses pembuatan keputusan, baik yang implisit maupun eksplisit dimana harapan-harapan aktor-aktor menyatu dalam suatu bidang hubungan internasional tertentu."*[11]

Rangkain dari prinsip, norma, aturan dan proses pembuatan keputusan tersebut merupakan komponen utama dari sebuah rejim yang menentukan karakteristiknya. Prinsip yang didefinisikan sebagai kepercayaan akan fakta, hubungan sebab akibat dan pembenaran akan sesuatu yang salah. Norma berkaitan dengan standar tingkah laku yang menetukan hak-hak dan kewajiban. Yang dimaksud dengan peraturan

---

[11] Definisi ini merupakan hasil kesepakatan yang dicapai dalam sebuah konferensi tentang rezim internasional, yang kemudian dibukukan oleh Stephen Krasner. Definisi ini tertuang dalam Stephen D. Krasner, "Structural Causes and Regime Consequences: Regime as Intervening Variables", International Organization, Vol. 36, No. 2 (Spring 1982), hal 186

UPN "VETERAN" JAKARTA

adalah anjuran atau larangan terhadap suatu tindakan secara spesifik. Sedangkan proses pembuatan keputusan menyangkut pembuatan dan implementasi dari pilihan bersama.[12]

Keempat komponen ini memang saling terkait dan sesunguhnya tetap sulit dipisahkan secara tegas. Namun bila dikaitkan pada definisi Young, maka keempat komponen tersebut disatu pihak cukup rinci untuk memudahkan operasionalisasi dan dipihak lain tetap mampu memenuhi fungsi substantif, prosedural dan implementatif dari sebuah rejim. Kalaupun masih ada ketidaktegasan pemisah antar komponen tersebut, hal itu justru menunjukan kekokohan sebuah rejim. Menurut Robert Keohane, keterkaitan antara keempat komponen dalam sebuah rejim yang kuat cenderung sangat erat dan justru keterkaitan inilah yang memberi legitimasi substantif, prosedural dan implementasi dari rejim tersebut.[13]

Suatu rejim bukan suatu konstruksi yang statis melainkan dinamis, dengan kemampuan untuk berkembang dan mengalami perubahan. Menurut Young sebuah rezim dapat berubah melalui proses transformasi yang disebabkan oleh dinamikan internal rejim maupun dorongan dari linkungan bidang yang diatur rejim tersebut. Transformasi ini terjadi bila ada perubahan mendasar pada komponen-komponen substantif, prosedural dan implementasi dari rejim tersebut.[14]

Bila transformasi ini diaplikasikan pada definisi Krasner, maka

---

[12] *Ibid*., hal. 186.

[13] Kohane, *Op.chit.,* hal. 58

[14] Oran Young, *Regime Dynamics: The Raise and Fall of International Regimes,* International Organization, Vol. 36, No. 2, (Spring 1982), hal. 291

UPN "VETERAN" JAKARTA

perubahan substantif, prosedural atau implementasi ini dapat dilihat dari perubahan pada prinsip, norma, aturan dan proses pembuatan keputusan. Menurut Krasner, perubahan pada peraturan dan prosedur pembuatan keputusan menandakan terjadinya perubahan dalam rejim *(within),* sedangkan perubahan pada prinsip dan norma berarti perubahan pada rejim itu sendiri *(of)* secara mendasar.[15]

Transformasi itu sendiri, menurut Young dapat terjadi melalui tiga jenis proses. Proses transformasi pertama terjadi akibat adanya kontradiksi internal dalam rejim. Hal ini terjadi bila ketentuan dalam komponen-komponen utama rejim yang mengatur hak dan kewajiban anggota saling bertentangan. Kontradiksi internal dapat berkembang secara gradual sebagai bagian dari beroperasinya rejim atau secara mendadak akibat konflik yang tak dapat diselesaikan *(irreconcilable conflicts).* Sebagai contoh, Young mengemukakan bahwa sebuah rejim berdasarkan perjanjian Svalbard pada tahun 1920 menjamin akses dari semua partisipan terhadap sumber daya alam disuatu daerah secara tidak terbatas. Ketentuan seperti ini akan menimbulkan tumpang tindih klaim yang dapat menyebabkan konflik antar anggota.[16]

Proses transformasi pertama menurut Young sudah dijelaskan sebelumnya, pada saat ini akan dijelaskan dinamikan perubahan atau proses transformasi rejim menurut Young yang kedua dikarenakan restrukrisasi

---

[15] Krasner, *Loc.Cit.,* hal 187

[16] Young, *Regime Dymanics : The Raise and Fall of International Regimes, Loc.Cit.,* hal 291

UPN "VETERAN" JAKARTA

kekuatan *(shift in the underlying structure of power)* dan ketiga dikarenakan adanya tekanan dari luar *(exogonous forces).* Restrukturisasi kekuasaan baik yang terjadi secara bertahap maupun mendadak dapat membawa perubahan yang signifikan pada rejim. Restrukturisasi kekuasaan terjadi ketika pemimpin atau hegemon dalam rejim gagal memberikan kepuasan bagi para anggotanya baik dalam tindakan maupun cara berpikirnya. Ketiga adalah tekanan dari luar yang tidak dapat diprediksi kapan munculnya seperti krisis ekonomi, perubahan lingkungan, perkembangan teknologi dan ledakan populasi. Dengan hal tersebut dapat mempengaruhi suatu rejim yang lama yang telah dianggap tidak dapat mempertahankan serangkaian norna, prinsip dan peraturan maka harus adanya perubahan memalaui transformasi rejim.[17]

[17] Young, *Op.chit.,* hlm 292-294

UPN "VETERAN" JAKARTA

I.7 Model Analisis

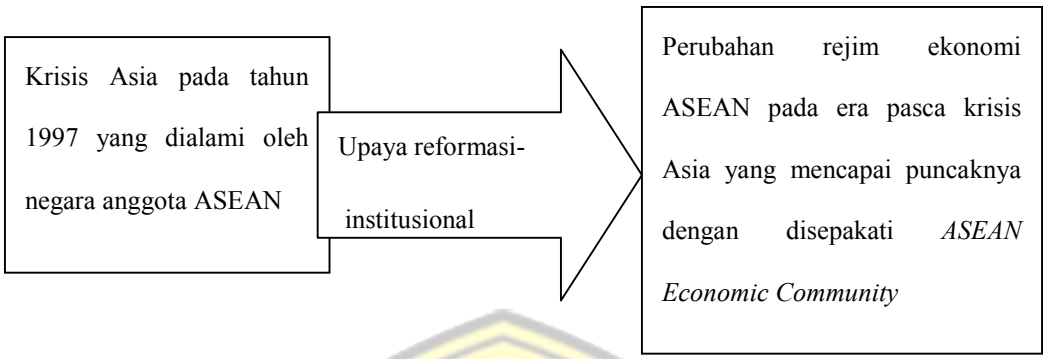

Berdasarkan bagan diatas, krisis Asia pada tahun 1997 yang dialami oleh negara anggota ASEAN mengakibatkan dampak yang buruk bagi negara anggota ASEAN khususnya melumpuhkan perekonomian ASEAN. Maka dengan hadirnya krisis tersebut menjadi pemicu adannya reformasi kelembagaan yang dilakukan oleh ASEAN sehingga ASEAN dapat lebih terintegarsi dan lebih responsif dalam kerjasama ekonomi ASEAN yang ditinjau dari ASEAN Economic Community, Blue print AEC dan juga ASEAN Charter yang bertujuan sebagai pencapaian mengintegrasikan kawasan melalaui kerjasama ekonomi dan juga sebagai landasan konstitusional ASEAN hasil dari reformasi rejim ekonomi ASEAN pasca Krisis Asia. Dalam tulisan ini melihat bahwa krisis Asia menyebabkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kelembgaan ASEAN, tetapi fokus dalam penelitian ini hanya melihat bagaimana upaya-upaya perubahan itu terjadi didalam kelembagaan ASEAN.

UPN "VETERAN" JAKARTA

I.8 Asumsi

Asumsi yang mendasar dalam pembahasan penilitian ini adalah Krisis Ekonomi Asia yang terjadi pada tahun 1997 memberikan dampak yang buruk pada negara anggota ASEAN sehingga ASEAN melakukan sejumlah reformasi rejim ekonomi yang baru maka dengan adanya upaya-upaya perubahan tersebut diharapkan ASEAN sebagi suatu lemabaga regional akan lebih responsif apabila terjadi krisis dimasa mendatang.

I.9 Metodologi Penulisan

Untuk penulisan skripsi ini penulis bertujuan untuk menggambarkan persolan Krisis Asia 1997 yang mendorong ASEAN melakukan serangkaian reformasi rejim ekonomi ASEAN. Maka metode penulisan ini yaitu metoode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang bersifat mendiskripsikan kenyataan atau fakta sesuai data yang diperoleh dan memberikan makna pada persolaan tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu melalui data primer dan data skunder. Data primer dapat diperoleh melalui proses wawancara mendalam dengan narasumber terkait ataupun studi literatur atas dokumen-dokumen resmi ASEAN. Selanjutnya, data skunder diperoleh dengan melalukuan studi pustaka yang sifatnya tertulis melalui buku-buku, jurmal berkala, majalah ilmiah, dokumen, artikel-artikel lepas, koran dan internet. Setelah data-data sudah terkumpul melalui seleksi dan pengelompokan sesuai dengan kebutuhan maka dilaksanakan analisis data. Analisis data ini dilakukan agar data yang telah diperoleh dari pengamatan

UPN "VETERAN" JAKARTA

dapat diartikan secara jelas.

I.10 Sistematika Pembabakan

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang berisiskan latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjuan pustaka, kerangka pemikiran, model analisis, asumsi/hipotesis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : DAMPAK KRISIS ASIA TAHUN 1997 TERHADAP PEREKONOMIAN DAN KELEMBAGAAN ASEAN

Bab ini menejelaskan secara jelas proses terjadinya krisis Asia pada tahun 1997 sehingga memberikan dampak yang buruk bagi perekonomian dan kelembagaan di ASEAN khususnya melumpuhkan perekonomian negara anggota ASEAN. Dengan lemahnya kelembagaan yang dimiliki ASEAN pada saat krisis ekonomi terjadi semakin membuat ASEAN tidak dapat memainkan peranya untuk menyelamtakan negara anggotanya

BAB III : ANALISIS TERHADAP PROSES PERUBAHAN REJIM EKONOMI ASEAN PASCA KRISIS ASIA

Strategi dan upaya-upaya ASEAN dalam merespon

UPN "VETERAN" JAKARTA

krisis Asia untuk melakukan perubahan rejim ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan menciptakan integrasi ekonomi di ASEAN pasca krisis Asia. Bab ini juga akan menjelaskan komponen-komponen rezim ekonomi ASEAN sebelum dan sesudah krisis Asia.

BAB IV : KESIMPULAN

Menyimpulkan bagaimana perubahan rejim ekonomi ASEAN melalui upaya-upaya yang dilakukan ASEAN pasca krisis Asia pada tahun 1997 sampai tahun 2007 sehingga menciptakan rejim ekonomi yang baru bagi seluruh anggota ASEAN.

UPN "VETERAN" JAKARTA